STIE

STUDI KASUS
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

INTEGRITAS DALAM BISNIS

Ketika Keuntungan Bertentangan dengan Kejujuran: Dilema Etika, Hukum, dan Antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Mata Kuliah: Etika, Hukum, dan Bisnis

Program Studi S1 Manajemen | STIE Widya Wiwaha Yogyakarta



Membangun Profesionalisme, Menegakkan Integritas

STUDI KASUS

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

INTEGRITAS DALAM BISNIS

Ketika Keuntungan Bertentangan dengan Kejujuran: Dilema Etika, Hukum, dan Antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Mata Kuliah: Etika, Hukum, dan Bisnis | Integrasi Pendidikan Antikorupsi



Gambar: Ilustrasi situasi pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.

A. Identitas dan tujuan pembelajaran

Studi kasus ini ditujukan kepada mahasiswa Program Studi S1 Manajemen STIE Widya Wiwaha. Materi mengintegrasikan konsep etika bisnis, hukum bisnis, tata kelola perusahaan, dan Pendidikan Antikorupsi.

Setelah mempelajari dan mendiskusikan kasus ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku koruptif dalam aktivitas bisnis, mengidentifikasi pelanggaran prinsip etika dan hukum, menganalisis konflik kepentingan, mengevaluasi keputusan bisnis berdasarkan prinsip integritas, serta menyusun strategi pencegahan korupsi melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan.

B. Deskripsi kasus: Proyek pengadaan yang menguji integritas

Kasus berikut merupakan kasus fiktif untuk kepentingan pembelajaran, bukan gambaran kejadian di STIE Widya Wiwaha atau perusahaan tertentu.

PT Maju Bersama merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan peralatan kantor dan teknologi informasi. Perusahaan tersebut telah berkembang selama delapan tahun dan memiliki sejumlah klien dari perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

Perusahaan sedang mengikuti proses pengadaan perangkat komputer dan perlengkapan teknologi informasi pada sebuah lembaga publik dengan nilai kontrak sebesar Rp2,5 miliar. Proyek tersebut sangat penting bagi perusahaan karena berpotensi meningkatkan pendapatan dan memperluas jaringan bisnis.

Direktur perusahaan, Bapak A, menunjuk Manajer Pemasaran, Bapak B, sebagai penanggung jawab proses penawaran. Dalam proses persiapan dokumen, Bapak B mengetahui bahwa terdapat perusahaan pesaing yang juga mengikuti tender. Perusahaan pesaing tersebut memiliki harga penawaran lebih rendah dan pengalaman proyek yang lebih banyak.

Beberapa hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen, seorang perantara yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat pengadaan menghubungi Bapak B. Perantara tersebut menawarkan bantuan agar PT Maju Bersama dapat memenangkan proyek. Syaratnya, perusahaan harus memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu setelah kontrak ditandatangani.

Perantara menyebut pemberian tersebut sebagai "biaya koordinasi" dan bukan suap. Ia juga menjanjikan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Pada saat yang sama, Bapak B mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota tim pengadaan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT Maju Bersama. Hubungan tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka dalam proses pengadaan.

Masalah semakin kompleks ketika Direktur perusahaan meminta Bapak B mempertimbangkan tawaran tersebut. Direktur beralasan bahwa perusahaan harus mempertahankan kelangsungan usaha dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Menurutnya, praktik pemberian uang pelicin sudah menjadi kebiasaan dalam beberapa transaksi bisnis.

Bapak B menghadapi dilema. Apabila menolak tawaran tersebut, perusahaan berpotensi kehilangan proyek besar. Namun, apabila menerima tawaran, perusahaan berisiko melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika bisnis. Ia juga khawatir bahwa praktik tersebut akan merusak reputasi perusahaan dan menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat.

Di sisi lain, staf keuangan perusahaan mengetahui adanya rencana pengeluaran dana untuk membayar perantara. Ia diminta membuat laporan pengeluaran dengan keterangan "biaya konsultasi dan administrasi". Staf tersebut menyadari bahwa keterangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang sebenarnya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keuntungan bisnis dapat membenarkan tindakan yang melanggar hukum dan integritas? Apakah loyalitas kepada pimpinan perusahaan harus lebih diutamakan daripada tanggung jawab moral dan hukum?

C. Fakta dan permasalahan dalam kasus

Fakta kasus	Permasalahan yang perlu dianalisis
Perusahaan mengikuti pengadaan senilai Rp2,5 miliar	Risiko penyimpangan dalam proses pengadaan
Perantara meminta sejumlah uang	Dugaan suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan
Terdapat hubungan keluarga dengan anggota tim pengadaan	Konflik kepentingan
Direktur mendorong pemberian uang	Penyalahgunaan kewenangan dan budaya organisasi tidak berintegritas
Staf keuangan diminta membuat laporan tidak sesuai fakta	Manipulasi pencatatan keuangan
Perusahaan menghadapi tekanan untuk memenangkan proyek	Dilema antara keuntungan dan kepatuhan hukum

D. Analisis integrasi Etika, Hukum, dan Pendidikan Antikorupsi

1. Perspektif etika bisnis

Dalam perspektif etika bisnis, tindakan perusahaan harus mempertimbangkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan para pemangku kepentingan. Keberhasilan bisnis tidak semestinya hanya diukur berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan cara perusahaan memperoleh keuntungan tersebut.

Pemberian uang kepada perantara untuk memengaruhi keputusan pengadaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Praktik tersebut menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan tertentu dan merugikan peserta lain yang mengikuti proses secara jujur.

Mahasiswa perlu memahami bahwa alasan "sudah menjadi kebiasaan bisnis" tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan yang tidak etis. Kebiasaan yang menyimpang justru perlu diperbaiki melalui kepemimpinan yang berintegritas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Perspektif hukum bisnis dan antikorupsi

Dari perspektif hukum, kasus ini perlu dianalisis berdasarkan kemungkinan adanya tindakan penyuapan, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, konflik kepentingan, serta manipulasi dokumen keuangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, mahasiswa dapat mempelajari relevansi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk ketentuan mengenai suap dan gratifikasi. Pembahasan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila objek pengadaannya merupakan pengadaan pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa tidak setiap pembayaran kepada perantara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penilaian hukumnya harus memperhatikan tujuan pembayaran, pihak penerima, hubungan dengan jabatan atau kewenangan, maksud pemberian, serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu membedakan biaya jasa profesional yang sah dan transparan dari pembayaran yang bertujuan memengaruhi keputusan secara tidak patut.

3. Perspektif Pendidikan Antikorupsi

Kasus ini dapat digunakan untuk menginternalisasikan sembilan nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi.

Nilai antikorupsi	**Implementasi dalam kasus**
Jujur	Tidak memalsukan laporan pengeluaran dan dokumen penawaran
Peduli	Mempertimbangkan kerugian masyarakat akibat korupsi
Mandiri	Berani mengambil keputusan tanpa tekanan atasan
Disiplin	Mematuhi prosedur dan ketentuan pengadaan
Tanggung jawab	Bertanggung jawab atas keputusan bisnis
Kerja keras	Memenangkan proyek melalui kompetensi dan kualitas
Sederhana	Tidak mengutamakan keuntungan dengan cara tidak patut
Berani	Menolak praktik suap dan melaporkan penyimpangan
Adil	Menghormati persaingan usaha yang sehat

4. Perspektif tata kelola perusahaan

PT Maju Bersama seharusnya menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Perusahaan perlu memiliki prosedur pengadaan yang transparan, kebijakan antisuap, pengendalian internal, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta aturan mengenai konflik kepentingan. Pimpinan perusahaan juga harus memberikan keteladanan dalam pengambilan keputusan.

E. Dilema keputusan: Apa yang seharusnya dilakukan?

Mahasiswa diminta mengambil posisi sebagai Bapak B, Manajer Pemasaran PT Maju Bersama.

Situasi keputusan

Direktur meminta Anda menyetujui pembayaran kepada perantara agar perusahaan memenangkan proyek pengadaan senilai Rp2,5 miliar.

Apa keputusan Anda?

Menolak pembayaran dan mengikuti proses pengadaan secara jujur.

Menolak pembayaran serta melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang tepat.

Menyetujui pembayaran karena merupakan perintah direktur.

Mengundurkan diri karena tidak bersedia terlibat dalam praktik tersebut.

Jelaskan alasan keputusan Anda berdasarkan etika, hukum, dan nilai antikorupsi.

Analisis keputusan saya

Keputusan yang diharapkan adalah menolak pemberian uang yang bertujuan memengaruhi proses pengadaan, tidak melakukan manipulasi laporan keuangan, mendokumentasikan fakta secara benar, dan menggunakan mekanisme pelaporan yang aman serta sesuai prosedur. Mahasiswa juga perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran dan pentingnya menghindari tuduhan yang belum terverifikasi.

F. Pertanyaan diskusi dan analisis mahasiswa

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

1. Identifikasi bentuk-bentuk perilaku koruptif atau risiko korupsi yang muncul dalam kasus PT Maju Bersama.
2. Mengapa pemberian uang kepada perantara untuk memengaruhi keputusan pengadaan bertentangan dengan prinsip etika bisnis?

3. Apakah perintah direktur dapat membebaskan Bapak B dari tanggung jawab moral dan hukum? Jelaskan.
4. Analisis hubungan konflik kepentingan dengan prinsip transparansi dan independensi dalam tata kelola perusahaan.
5. Mengapa permintaan untuk mengubah keterangan pengeluaran menjadi "biaya konsultasi dan administrasi" merupakan persoalan integritas?
6. Jelaskan sembilan nilai antikorupsi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
7. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat mencegah terulangnya kasus serupa?
8. Susun kebijakan antisuap sederhana yang seharusnya diterapkan oleh PT Maju Bersama.
9. Jika Anda menjadi direktur perusahaan, keputusan apa yang akan Anda ambil dan bagaimana menjelaskan keputusan tersebut kepada pemegang saham?
10. Apa pembelajaran utama yang dapat diterapkan mahasiswa ketika kelak menjadi manajer, wirausahawan, atau pemimpin organisasi?

G. Aktivitas pembelajaran: Simulasi sidang etika bisnis

Untuk memperkuat internalisasi nilai antikorupsi, dosen dapat mengembangkan kasus menjadi simulasi sidang etika bisnis. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan peran sebagai direksi perusahaan, manajer pemasaran, staf keuangan, tim kepatuhan, perwakilan pemegang saham, dan tim pengawas independen.



Setiap kelompok diminta menyusun argumentasi berdasarkan peran masing-masing. Direksi menjelaskan pertimbangan bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Manajer pemasaran menjelaskan dilema yang dihadapi. Staf keuangan menguraikan risiko manipulasi pencatatan. Tim kepatuhan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan etika. Tim pengawas menyusun rekomendasi pencegahan serta perbaikan tata kelola.

Simulasi diakhiri dengan penyampaian keputusan bersama. Mahasiswa harus mampu menjelaskan alasan keputusan berdasarkan hukum, etika, dan nilai antikorupsi, bukan hanya berdasarkan kepentingan memperoleh keuntungan.

H. Tugas individu dan kelompok

Tugas individu: Mahasiswa menulis esai analisis sepanjang 800–1.000 kata dengan judul "Integritas sebagai Fondasi Keberlanjutan Bisnis". Esai harus memuat identifikasi masalah, analisis etika dan hukum, penerapan nilai antikorupsi, serta keputusan yang direkomendasikan.

Tugas kelompok: Mahasiswa menyusun rancangan Corporate Anti-Corruption Policy sederhana untuk PT Maju Bersama. Dokumen memuat komitmen antikorupsi, larangan suap, kebijakan konflik kepentingan, transparansi pengadaan, pencatatan keuangan, mekanisme pengaduan, dan sanksi internal sesuai ketentuan perusahaan.

I. Rubrik penilaian pembelajaran

Komponen penilaian	**Bobot**
Identifikasi masalah etika, hukum, dan risiko korupsi	20%
Ketepatan analisis hukum dan etika bisnis	20%
Penerapan sembilan nilai antikorupsi	20%
Kualitas argumentasi dan keputusan	20%
Rekomendasi pencegahan korupsi dan tata kelola	20%
Total	100%

J. Refleksi dan pesan pembelajaran

Keuntungan bisnis dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi keuntungan yang diperoleh melalui ketidakjujuran akan merusak kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan usaha. Integritas bukan penghambat keberhasilan bisnis, melainkan fondasi untuk membangun bisnis yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.